



EDISI 4
2020

Buletin Pajak Bantul

Dropping

Sppt Pbb P2

**Bantul Bisa
Lawan Covid-19**

**Temu Wajib
Pajak**

**Monitoring
& Evaluasi**

**Laporan
Bulanan
PPAT**

**Sosialisasi
Cukai**

**Simbolis
Penyerahan**

**SPPT PBB
P2**

**Fitur Baru
SPPT PBB**

**Sosialisasi
Pengelolaan
Pajak Bumi &
Bangunan**

**Covid 19 &
Pajak Bantul**

**Kemeriahan
Pesta
Rakyat**

**Wisata Bantul
Taman Klodran
& Adipura**

**Kuliner Khas Bantul
Sate Klatak**

**Sang
Bintang
Pajak
2019**



PEMBINA

Drs. Trisna Manurung ,M.Si

PENANGGUNGJAWAB

Darmawan Purwana, SE

PEMIMPIN REDAKSI

Herwina Dian Aprilia, S.E,M.A

SEKRETARIS REDAKSI

Harmidarto, S. IP

EDITOR

Deni Ari Dwi Hardani,S.T

REPORTER

Dian Agustiani, A.Md

DATA ANALYST

Fitri Susanti

FOTOGRAFER

Tim Pajak Bantul

DOKUMENTASI FOTO

Isnaini Nur Khasanah



CATATAN REDAKSI

Mengawali tugas di awal tahun 2020 tim pajak Bantul, mengadakan workshop peningkatan kapasitas SDM petugas pajak yang dikemas dalam bentuk outbound disebuah lokasi di utara kota Jogja. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk penyegaran atas target tahun 2019 yang menguras energy,waktu dan juga pikiran sekaligus sebagai sarana untuk menjalin komitmen bersama menghadapi target tahun 2020 yang pastinya lebih berat dan lebih menantang.

Dalam sambutannya PLT Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan, Dharmawan Purwana,S.E menyampaikan bahwa kita semua satu keluarga,satu tubuh harus bisa menjaga kebersamaan, dan kompak dalam ketugasan. Tidak boleh saling menyalahkan ataupun menjatuhkan. Saling bahu membahu dalam mencapai target, apalagi tantangan tahun ini semakin berat. Terimakasih atas kerja keras teman-teman semua di tahun 2019, realisasi pajak kita tercapai 213,6 Milyar dari target perubahan sebesar 198,7 Milyar. Dan semua jenis pajak daerah tercapai diatas 100%. Terimakasih sekali lagi,hari ini kita sejenak melupakan target dan pekerjaan dikantor agar besok lebih fresh dan semangat lagi dalam bekerja.Kedepannya kita harus lebih baik dan lebih kompak.

Outbound yang dilaksanakan dari pagi hingga malah hari berlangsung lancar. Semua tertawa dan hepi. Bersemangat mengikuti setiap sesi acara.

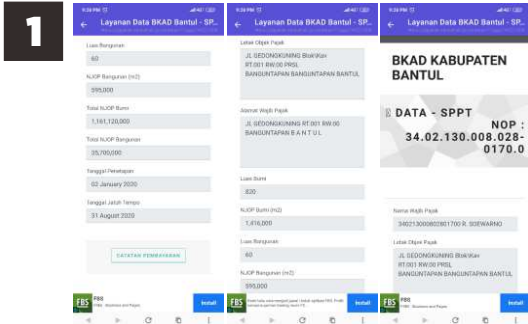
INFO & LAYANAN :  bkad@bantulkab.go.id  pajak bantul  pajakbantul

 (0274) 367260 (direct) ; 367509 ext 156

 081779498080  pajakbantul  pajakbantul

DAFTAR ISI

FITUR BARU SPPT PBB P2 TAHUN PAJAK 2020



QR CODE (QUICK RESPON CODE)



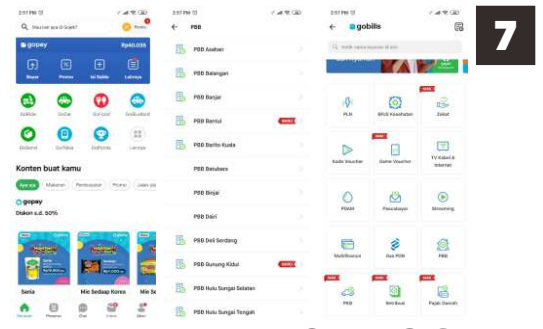
TANDATANGAN DIGITAL (DIGITAL SIGNATURE)



MAKIN CEPAT, MAKIN AKURAT



MAKIN PRAKTIS & MAKIN LUAS MENJANGKAU



DROPPING SPPT TAHUN PAJAK 2020



GASS POOL LUNAS PBB P2



SOSIALISASI PENGELOLAAN PAJAK BUMI & BANGUNAN (PBB P2) TAHUN PAJAK 2020



SIMBOLIS PENYERAHAN SPPT PBB P2 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020



DAFTAR ISI

TAGIHAN SPPT MU BERAT?

20



TEMU PERANGKAT DESA

22



COVID 19

28



COVID 19 & PAJAK BANTUL

30



BANTUL BISA LAWAN COVID-19

32



MONITORING & EVALUASI LAPORAN BULANAN PPAT

36



SOSIALISASI PENDATAAN HOTEL, WISMA DAN PONDOKAN

38



KEMERIAHAN PESTA RAKYAT DI ACARA PAJAK BANTUL AWARD 2019

39



SANG BINTANG PAJAK 2019

41



BERANI JUJUR HEBAT

43



DAFTAR ISI

TEMU WAJIB PAJAK DI GRAND DAFAM ROHAN

45



GHOST RESTO

47



SERBA SERBI SOSIALISASI MALAM HARI

49



SOSIALISASI KETENTUAN DIBIDANG CUKAI TEMBAKAU TAHUN 2019

51



WORKSHOP BENDAHARA PENGELUARAN KABUPATEN BANTUL

53



WORKSHOP PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PETUGAS PAJAK DAERAH

55



FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

57



TAMAN KLODRAN & TAMAN ADIPURA

61



NEGERI DIATAS AWAN KEBUN BUAH MANGUNAN

62



SATE KLATHAK

64



FITUR BARU SPPT PBB P2 TAHUN PAJAK 2020

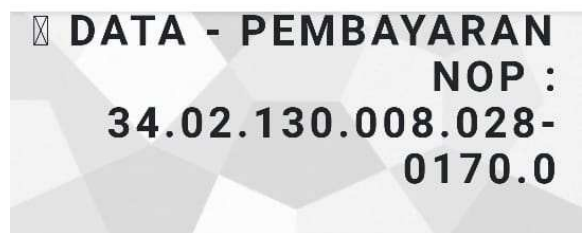
Selalu ada yang baru yaa kawan pajak Bantul. Kali ini di cetak massal SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) PBB P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) tahun pajak 2020.

Iya perhatikan aja di lembar SPPT PBB P2 tahun 2020 ada tambahan fitur barcode dan digital signature. Penambahan fitur QR code (Quick Response Code) dimanfaatkan dalam proses pembayaran. Sehingga tidak perlu mengetikkan 18 digit NOP (Nomer Objek Pajak) cukup scan QR Code sehingga proses pembayaran lebih cepat dan menghindari kesalahan pengetikan NOP.

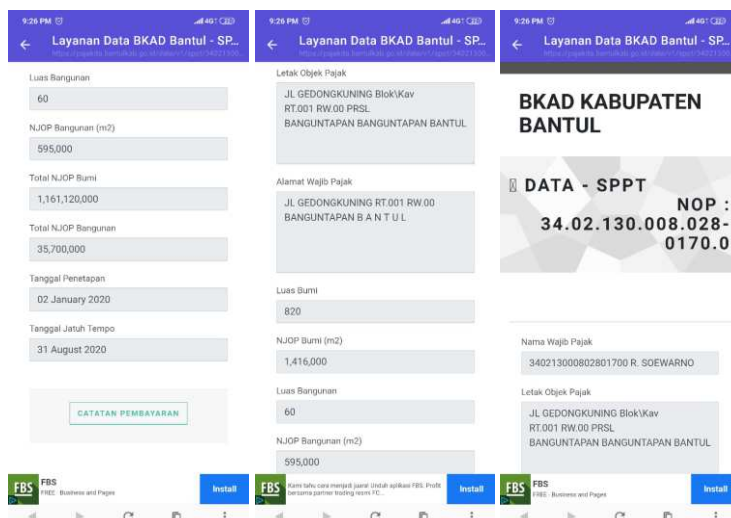
Sedangkan penggunaan digital signature menjadikan hasil cetakan SPPT PBB P2 tidak perlu lagi dibubuhkan cap basah seperti tahun-tahun sebelumnya. Sehingga proses cetak lebih cepat dan bisa segera didistribusikan.



BKAD KABUPATEN BANTUL



Daftar riwayat pembayaran



CETAK

Tahun	Pokok	Denda	Jumlah	Sta Pei
2020	2373640	0	2373640	BE
2019	2373640	0	2373640	SU

Install

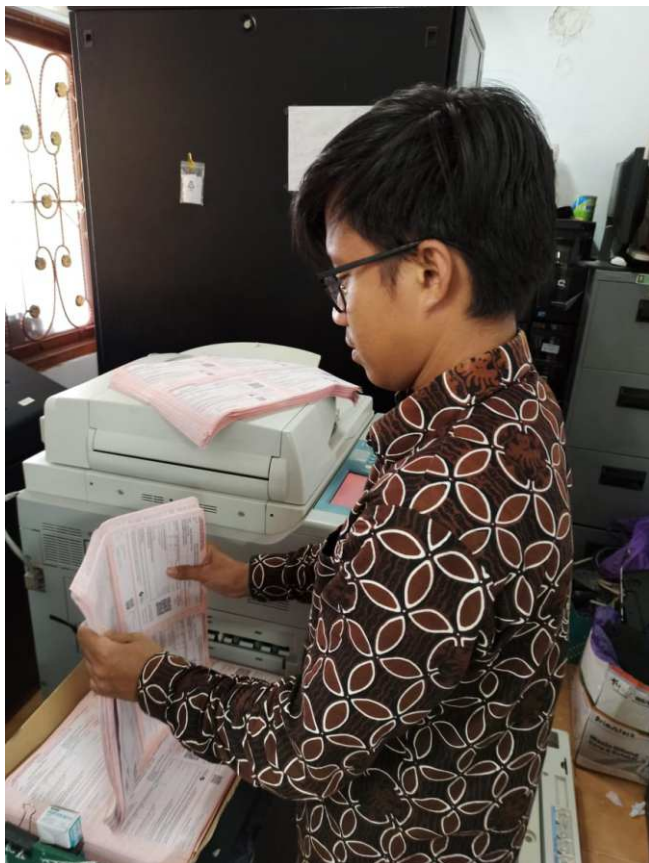
Tahun 2020 ini jumlah SPPT yang dicetak 635.831 lembar, dengan jumlah ketetapan sebesar Rp. 70.902.092.667,00, terdapat peningkatan jumlah SPPT yang dicetak sekitar 5 ribu lembar. Hal ini dipengaruhi antara lain adanya pemecahan objek pajak dan proses jual beli objek pajak.

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dicetak setiap tahunnya. Dari tahun 2019 proses cetak dilaksanakan lebih awal. Proses cetak yang biasanya dilaksanakan di awal tahun pajak, sudah bisa mulai dicetak

di akhir tahun anggaran sebelum tahun pajak. Artinya SPPT PBB P2 Tahun pajak 2020 sudah mulai dicetak di akhir bulan Desember 2019.

Pastikan yaa tahun ini kawan pajak Bantul menerima lembar SPPT PBB P2 dan segera bayarkan biar bisa ikut undian hadiah. Yuuk Bayar PBB P2 di awal waktu.

QR CODE (Quick Respon Code)



Quick Respon Code atau QR Code adalah Kode QR yang merupakan bentuk evolusi barcode atau kode batang dari satu dimensi menjadi dua dimensi. Barcode dan QR Code adalah dua kode yang sama-sama penting dan memiliki fungsi hampir serupa. Hanya saja, QR Code diperuntukkan bagi data berkapasitas besar, sedangkan barcode untuk data yang lebih kecil.

Barcode adalah awal dari hadirnya QR Code. Dengan adanya kode batang yang tersedia sebagai kode informasi, barcode hadir membawa kemudahan bagi penggunaannya untuk menyimpan data yang hendak disampaikan. Penggunaan barcode ini memanfaatkan data optik yang dipindai oleh mesin scan. Cara kerjanya adalah dengan membedakan spasi garis paralel dan lebar garis antara satu batang dengan batang lainnya.

Sejak awal diluncurkan, kode batang ini memang khusus digunakan untuk mempermudah proses pengecekan harga produk di swalayan. Bayangkan saja jika kode barcode tidak digunakan, maka proses mengantri di kasir akan memakan waktu yang sangat lama karena harga produk harus dicari satu per satu.

Untuk fitur barcode ini sesuai dengan namanya yaitu kode batang, maka bentuknya pun hanya garis-garis berjajar menyerupai batang. Untuk membaca kode ini diperlukan alat scan khusus yang sudah terkoneksi dengan sistem komputer. Sehingga dalam penggunaan sehari-hari dinilai kurang efektif dan jauh lebih baik menggunakan QR Code yang bisa diakses melalui smartphone.

Dan akhirnya barcode berkembang menjadi QR code seperti yang banyak kita jumpai hari ini. QR code banyak digunakan dalam proses belanja, untuk mengetahui isi informasi dan lain sebagainya.

TANDATANGAN DIGITAL (Digital Signature)



Tanda tangan digital adalah suatu tanda tangan biasa yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sama dengan tanda tangan biasa pada dokumen kertas biasa. Tanda tangan adalah data yang apabila tidak dipalsukan, dapat berfungsi untuk menyatakan bahwa orang yang namanya tertera pada suatu dokumen setuju dengan apa yang tercantum pada dokumen yang ditandatanganinya.

SPPT PBB P2 yang diterbitkan tahun 2020 sudah mencantumkan tandatangan digital, tandatangan digital ini bukan seperti tandatangan yang di scan dan ditempelkan ya tetapi tandatangan sesuai izin Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Artinya, SPPT PBB P2 yang dicetak ini dijamin keasliannya, utuh, dan nir-penyangkalan sesuai prinsip keamanan dokumen digital yang disyaratkan.

Adapun sebelum menggunakan tandatangan digital SPPT PBB P2 yang jumlahnya ratusan ribu itu harus distempel dengan cap basah, sehingga dengan digital signature ini tidak perlu lagi di bubuhkan cap basah dan bisa lebih hemat waktu dan SDM.



Makin Cepat, Makin Akurat

Yuuk bayar PBB P2 di layanan mobil keliling. Pelayanan makin cepat, jadi nggak usah khawatir bakal antri terlalu lama. Karena apa? Karena SPPT yang diterbitkan tahun 2020 disertakan QR Code atau Quick Response Code yang lebih dikenal dengan kode QR. Sehingga layaknya di swalayan tinggal di scan QRnya akan muncul data objek pajak dan besaran pajak yang harus dibayarkan. Petugas yang dulunya harus mengetikkan 18 digit nomor obyek pajak, sekarang tinggal scan saja sehingga lebih cepat dan tentunya lebih akurat tidak akan salah ketik angka NOPnya. Petugas mobil keliling memudahkan entrinya, warga masyarakat juga bisa lebih cepat antrinya.

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

8 0 0 7 1 8 0 3

SPPT PBB
BUKUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK
411311
PERDESAAN

2867/3056
11465

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, TAHUN : 2020**

NOP : 34.02.080.001.051-0116.0

LETAK OBJEK PAJAK
BOTO RT.036 RW.03
PATALAN J E T I S BANTUL

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
*
BOTO RT.036 RW.03 PATALAN B A N T U L
NPWP : BELUM ADA

Objek Pajak	Luas (m2)	Kelas	NJOP per m2 (Rp)	Total NJOP (Rp)
Bumi	500	080	82.000	45.920.000
Bangunan	108	033	162.000	17.496.000

Tgl Cetak :
02 Januari 2020

Kepala



NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 63.416.000
 NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) 10.000.000
 NJOP Untuk Perhitungan PBB 53.416.000
 Tarif 0.1%
 PBB yang Terhutang 53.416

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DI BAYAR(Rp)
Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Enam Belas

TEMPAT PEMBAYARAN
BANK BPD DIY, BRI SYARIAH, BNI, BANK BUKOPIN, POS INDONESIA, BANK BRI, BANK BTN, APLIKASI GOJEK

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik, yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Balai Sertifikasi Elektronik

Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002

Tanggal Jatuh Tempo :
31 Agustus 2020

NOP 34.02.080.001.051-0116.0
 Nama WP *
 Letak OP BOTO RT.036 RW.03
 PATALAN J E T I S BANTUL



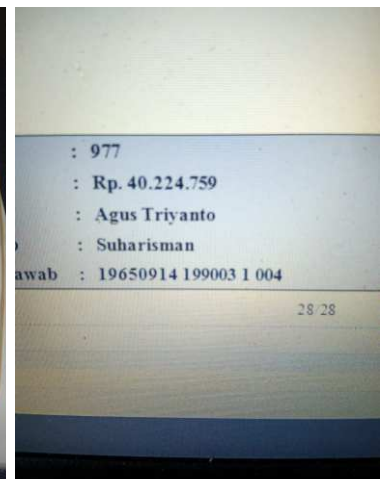
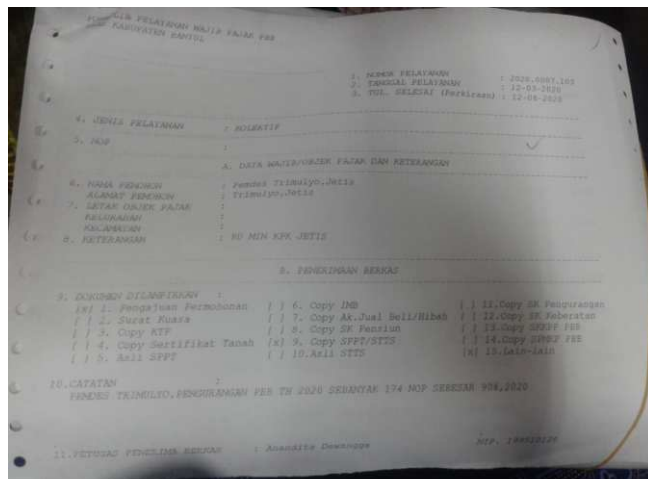
Diterima tgl
Tanda tangan

Thn SPPT / Rp. 2020 53.416

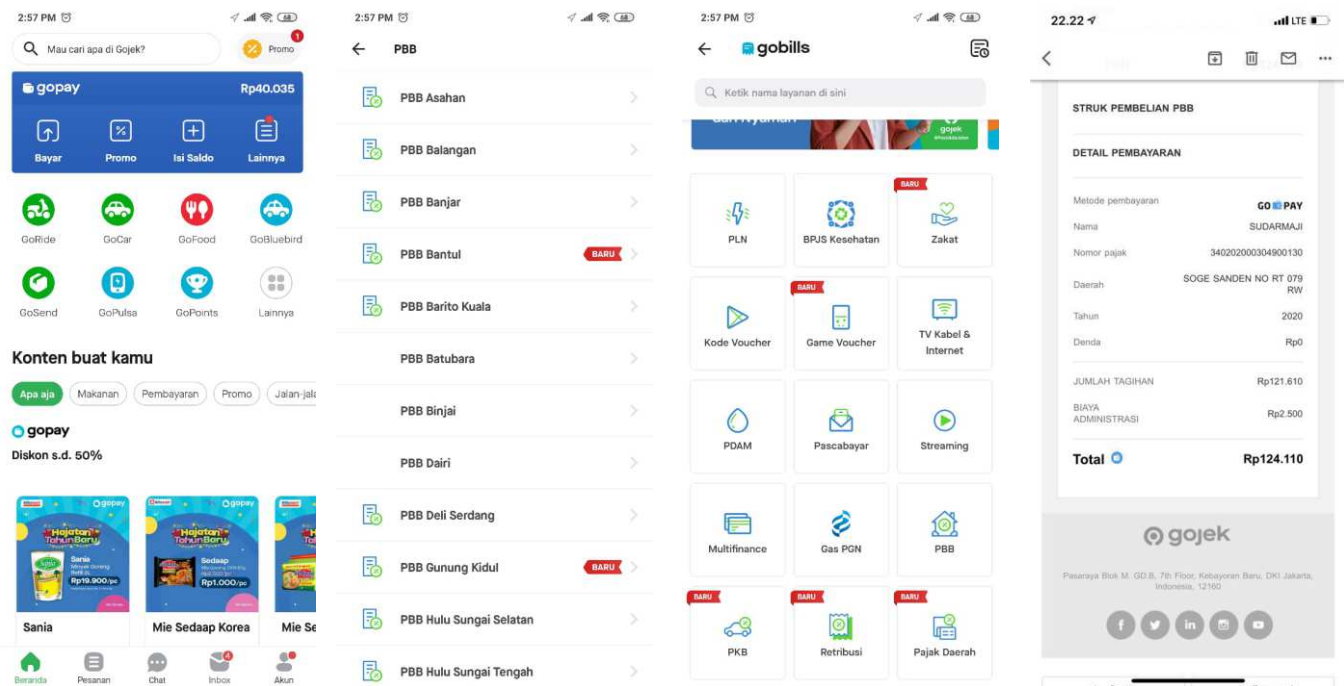
Nama Terang

Dengan menggunakan QR code ini proses input NOP (Nomor Obyek Pajak) di kasir layanan obil keliling menjadi lebih cepat. Dulu sebelum ada QR kemampuan petugas melayani pembayaran PBB P2 di mobil keliling hanya sekitar 350 NOP. Sekarang dengan QR code dalam sekali layanan bisa melayanai sampai dengan 750 NOP. Dua kali lebih cepat, lebih banyak dan lebih akurat. Makin cepat dan tentu akurat.

Selain itu QR Code tersebut bisa juga digunakan untuk mengetahui histori atau catatan pembayaran tahun-tahun sebelumnya. Kita tinggal download aplikasi pembaca QR di playstore, dan gunakan untuk scan QR di SPPT PBB P2, akan muncul data terkait obyek pajak seperti luas lahan, luas bangunan, alamat, nama pemilik dan juga catatan pembayarannya.



MAKIN PRAKTIS & MAKIN LUAS MENJANGKAU



Bayar PBB P2 wilayah Kabupaten Bantul, bisa pakai go-pay. BPD DIY telah menandatangani MoU dengan PT Dompot Anak Bangsa (GoPay) tentang layanan pembayaran tagihan (Multibiller) secara online. Melalui kerjasama ini, baik nasabah maupun masyarakat di Bantul akan bisa melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) menggunakan GoPay.

Pembayaran ini dapat dilakukan melalui fitur GoBills yang tersedia di aplikasi Gojek. Selain memberikan kemudahan kepada wajib pajak, penyediaan layanan ini juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah.

Dan juga mendukung upaya reformasi birokrasi dan transparansi finansial.

Warga masyarakat yang memiliki kewajiban membayar PBB P2 di wilayah Bantul tetapi tinggal di luar kota bisa memanfaatkan layanan go-pay. Lebih mudah dan lebih praktis tentunya.

Semakin banyak alternative layanan untuk pembayaran PBB P2. Selain pembayaran di Bank-bank yang bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bantul (Bank BPD DIY, BRI Syariah, Bukopin, BNI 46 dan Kantor Pos, Mobil layanan pajak keliling dan terakhir bisa melalui Go Pay. Yuuuk manfaatkan layanan ini. Makin mudahkan.

#PajakLunasPembangunanjelas.



REALISASI PAJAK DAERAH 2019

(Per 31 Desember 2019)

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Realisasi	Target Perubahan
Rp. 943 juta (157,28%)	Rp. 600 juta



Pajak Hiburan

Realisasi	Target Perubahan
Rp. 811,3 juta (115,9%)	Rp. 700 juta



Pajak Air Bawah Tanah (ABT)

Realisasi	Target Perubahan
Rp. 743,3 juta (123,89%)	Rp. 600 juta



Pajak Parkir

Realisasi	Target Perubahan
Rp. 237,9 juta (132%)	Rp. 180 juta



Pajak Sarang Walet

Realisasi	Target Perubahan
Rp. 1,4 juta (280%)	Rp. 500 ribu



2/2



REALISASI PAJAK DAERAH 2019

(Per 31 Desember 2019)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Realisasi	Target Perubahan
Rp. 90,8 M (106,8%)	Rp. 85 M



Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

Realisasi	Target Perubahan
Rp. 54,8 M (107%)	Rp. 51,2 M



Pajak Penerangan Jalan PLN (PPJ PLN)

Realisasi	Target Perubahan
Rp. 43,9 M (102,06%)	Rp. 43,1 M



Pajak Restoran

Realisasi	Target Perubahan
Rp. 15,1 M (126,14%)	Rp. 12 M



Pajak Hotel

Realisasi	Target Perubahan
Rp. 3,8 M (109,77%)	Rp. 3,5 M



Pajak Reklame

Realisasi	Target Perubahan
Rp. 2,3 M (128,5%)	Rp. 1,8 M



1/2



REALISASI PAJAK DAERAH TA 2014 - 2019



data 2014-2018: audited BPK
data 2019: data sementara s.d tanggal 31 Desember 2019



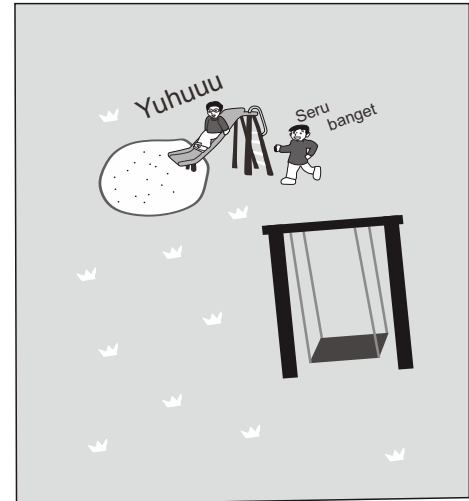
LAYANAN MOBIL KELILING PAJAK BANTUL TAHUN 2019

Total Hari Layanan 216 hari	Total Lokasi Posko 1474 lokasi	Total SPPT 137.292 SPPT
Hari Libur 68 hari	Hari Kerja 148 hari	Nominal Rp 9.908.849.796,-
Hari Libur 319 lokasi	Malam hari 53 lokasi	
Melayani SPPT dari 852 dusun	Melayani SPPT dari 72 kelurahan	Melayani SPPT dari 17 kecamatan
Paling banyak (SPPT): Soko, Seloharjo, Pundong 828 SPPT Rp. 30.716.601,-	Paling banyak (SPPT): Gilangharjo, Pandak 6.090 SPPT Rp. 290.261.126,-	Paling banyak (SPPT): Kecamatan Jetis 17.115 SPPT Rp. 772.979.069,-
Paling banyak (Nominal): Tamanan, Tamanan, Banguntapan 100 SPPT Rp. 254.812.406,-	Paling banyak (Nominal): Sitimulyo, Piyungan 3.522 SPPT Rp. 487.192.548,-	Paling banyak (Nominal): Kecamatan Banguntapan 7.406 SPPT Rp. 1.461.920.468,-

KECAMATAN	SPPT	NOMINAL	KECAMATAN	SPPT	NOMINAL
SRANDAKAN	6.270	370.930.502	DLINGO	239	10.176.425
SANDEN	4.220	293.626.028	PLERET	6.413	382.115.740
K R E T E K	9.108	564.601.340	PIYUNGAN	11.723	1.239.538.489
PUNDONG	13.192	498.198.864	BANGUNTAPAN	7.406	1.461.920.468
BAMBANGLIPURO	9.435	366.966.453	SEWON	8.542	1.008.267.671
PANDAK	14.315	721.242.829	KASIHAN	7.499	936.018.737
BANTUL	2.771	275.597.604	PAJANGAN	3.069	156.210.470
J E T I S	17.115	772.979.069	SEDAYU	2.314	240.667.246
IMOGIRI	13.661	609.791.861			
TOTAL				137.292	9.908.849.796

KOMIK BIJAK (BICARA PAJAK)

Disebuah taman



Sambil makan



Sampai di tempat makan





SELAMAT TAHUN ANGGARAN BARU 2020

SPPT 2020 SUDAH TERCETAK
& TERDISTRIBUSI

BAYAR LEBIH AWAL

DAPATKAN KESEMPATAN
MEMPEROLEH SEPEDA MOTOR



**Pajak Lunas
Pembangunan Jelas**

[@pajakbantul](#) [@pajakbantul](#) [Pajak Bantul](#) [Pajak Bantul](#)

**Drs. H. Suharsono
Bupati Bantul**



**Badan Keuangan & Aset Daerah
Kabupaten Bantul**

**JATUH TEMPO
PEMBAYARAN PBB-P2
31 JULI 2020**

@pajakbantul



Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
Badan Keuangan dan Aset Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
Badan Keuangan dan Aset Daerah



**JATUH TEMPO
PEMBAYARAN PBB-P2
31 AGUSTUS 2020**

@pajakbantul

@pajakbantul

**JATUH TEMPO
PEMBAYARAN PBB-P2
30 SEPTEMBER 2020**



Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
Badan Keuangan dan Aset Daerah



DROPPING SPPT TAHUN PAJAK 2020

Dropping SPPT PBB P2 Tahun Pajak 2020, selesai di bulan Januari sesuai target satu kecamatan selesai dalam satu hari. Dimulai dengan dropping ke kecamatan yang jatuh tempo lebih dahulu. Seperti tahun sebelumnya jadwal jatuh tempo pembayaran PBB P2 nya terbagi menjadi tiga yaitu jatu tempo di bulan Juli, Agustus dan September.



GASSS POOOL LUNAS PBB P2

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB P2 baru didrop ke desa-desa di Kabupaten Bantul bulan Januari 2020. Tetapi ternyata respon masyarakat sangat bagus, hal ini terlihat dari antusiasnya mereka yang dengan bersegera membayarkannya.

Hanya dalam hitungan hari setelah SPPT sampai ke desa dan didistribusikan ke warga selaku wajib pajak, sudah ada beberapa pedukuhan yang hampir dan bahkan lunas 100%.

Pencapaian tertinggi masih seperti tahun-tahun sebelumnya 20% atau 10 dusun dari 49 dusun di Dlingo sudah lunas 100 % satu bulan setelah drooping SPPT PBB P2. Keren sekali kan #kawanpajakbantul. Meskipun wilayah Kecamatan Dlingo didominasi oleh perdesaan dengan mayoritas mata pencaharian masyarakatnya adalah bertani, beternak atau berladang, akan tetapi tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak patut dicontoh. Memang nominal pajak yang harus mereka bayarkan termasuk rendah, tetapi melihat kondisi geografis dan tingkat hidup masyarakatnya yang masih menengah kebawah, kesadaran mereka untuk memprioritaskan pembayaran pajak diawal waktu patut di banggakan.





Selain Kecamatan Dlingo ada Kecamatan lain yang dusunnya sudah lunas 100% yaitu dusun Mangir Kidul Kecamatan Pajangan dan Dusun Bobok Tempel Kecamatan Pundong. Berikut Daftar dusun yang lunas 100% di bulan Februari 2020 :

DLINGO

1. Dukuh Terong I
2. Dukuh Pokoh I
3. Dukuh Rejosari
4. Dukuh Dlingo II
5. Dukuh Maladan

6. Dukuh Tekik
7. Dukuh Kebosungul
8. Dukuh Kediwung
9. Dukuh Jurug
10. Dukuh Sendangsari

PAJANGAN

1. Dukuh Mangir Kidul 100%

PUNDONG

1. Dukuh Bobok Tempel 100%



SOSIALISASI PENGELOLAAN PAJAK BUMI & BANGUNAN (PBB P2) TAHUN PAJAK 2020

Kecamatan Sanden, Kretek, Srandakan, Bambanglipuro.



Selasa, 11 Februari 2020 telah dilaksanakan Sosialisasi Pengelolaan Pajak Bumi Bangunan (PBB P2) tahun 2020 di Mandala Saba (Gedung Induk Lt III, Kompleks Parasamya Kabupaten Bantul)

Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Kepala BKAD Bantul, Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan BKAD, Camat, Lurah, Kaur Keuangan dan Dukuh di Kecamatan Sanden, Kretek, Srandakan, Bambanglipuro.



Dalam acara sosialisasi tersebut, telah disampaikan mengenai tata cara pengelolaan Pajak Bumi Bangunan dan Perkotaan (PBB P2) serta informasi bahwa SPPT PBB P2 telah seluruhnya didistribusikan ke masing-masing desa di Kabupaten Bantul. Untuk selanjutnya akan didistribusikan pada seluruh Wajib Pajak di wilayah Kabupaten Bantul

Tak lupa, dari #TimPajakBantul juga menyampaikan bahwa terdapat perbedaan tampilan SPPT PBB P2 Tahun 2020 dibandingkan dengan SPPT PBB P2 tahun sebelumnya. Yaitu dengan adanya penambahan tanda tangan elektronik serta QR Code yang dapat dipindai oleh Wajib Pajak untuk mengetahui detail Obyek Pajak serta riwayat pembayaran PBB P2.

Mari #SukseskanPajakBantul dengan segera membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB). Jangan ditunda-tunda ya #KawanPajakBantul

SIMBOLIS PENYERAHAN SPPT PBB P2 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

Simbolis penyerahan SPPT PBB P2 tahun ini dilaksanakan Selasa, 03 Maret 2020 di Mandala Saba Gedung Induk Lantai 3 Bantul. Dengan mengundang Bupati, Wakil Bupati, DPRD, dan Forkopimda serta pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul, institusi yang terkait pengelolaan PBB P2 seperti bank-bank rekanan pembayaran PBB P2, Kantor Pos, KPP Pratama Bantul, BPN Bantul, Camat, Lurah se Kabupaten Bantul, Notaris/PPAT, dan Perwakilan WP Panutan.

Tahun 2020 jumlah SPPT PBB P2 yang dicetak dan telah didistribusikan sebanyak 635.831 lembar. Dengan ketetapan sebesar Rp.70.902.092.667,00 dimana terdapat





kenaikan sebesar 1% dibandingkan ketetapan tahun sebelumnya Rp. 70.198.294.486,00. Kenaikan pokok ketetapan PBB P2 tersebut sebagian besar karena adanya penyesuaian NJOP kelas 1 tahun 2020 dan pemeliharaan basis data PBB P2 yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2019.

Dalam acara simbolis penyerahan SPPT PBB P2 juga tersedia stand-stand pembayaran PBB P2 dari bank-bank rekanan. Bupati, Wakil Bupati, serta Sekretaris Daerah diikuti pejabat-pejabat pemda melakukan pembayaran di stand-stand yang tersedia setelah acara simbolis selesai.



TAGIHAN SPPT MU BERAT?

Syarat
secara

- 1. setiap p...
- 2. dipinjam...
- 3. dipinjam...
- 4. dipinjam...
- 5. dipinjam...
- 6. dipinjam...
- 7. dipinjam...
- 8. dipinjam...
- 9. dipinjam...
- 10. dipinjam...
- 11. dipinjam...
- 12. dipinjam...
- 13. dipinjam...
- 14. dipinjam...
- 15. dipinjam...
- 16. dipinjam...
- 17. dipinjam...
- 18. dipinjam...
- 19. dipinjam...
- 20. dipinjam...

Kasih Dilan aja kalau nggak kuat hehehe. Nggak ding becanda itu mah. Memang kenaikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) PBB P2 tahun lalu menjadikan besaran PBB P2 yang harus dibayarkan menjadi melonjak cukup besar. Kenaikan NJOP yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan pengenaan PBB P2 cukup dirasakan masyarakat Bantul selaku wajib pajak. Kenaikan NJOP tersebut bukan tanpa alasan yaa #kawanpajakbantul, karena walaupun sudah dinaikkan sebenarnya masih jauh dibawah harga pasar.





Kenaikan NJOP sebagai pengali luas obyek pajak pada dasarnya tidak menjadikan kenaikan sampai 100%. Akan tetapi tetap saja menjadikan berat bagi sebagian warga Bantul, selaku wajib pajak. Tetapi tenang saja #kawanpajakbantul, wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan pengurangan atas besaran pajak yang harus dibayarkan, asalkan memenuhi persyaratan yang ada. Hal ini tercantum dalam Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan PBB P2.

Antara lain wajib pajak yang berhak mengajukan pengurangan PBB P2 adalah pensiunan, anggota veteran dan juga janda/dudanya.

Dalam peraturan Bupati tersebut diatur siapa saja yang boleh mengajukan pengurangan atas piutang PBB P2. Jadi Pemerintah Kabupaten Bantul tidak semata-mata menaikkan demi tercapainya target pajak daerah, tetapi juga memikirkan sebagian masyarakat yang merasa keberatan dengan kenaikan PBB P2. sehingga difasilitasi dengan Peraturan Bupati tersebut diatas.

TEMU PERANGKAT DESA

Dalam rangka meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan; dan percepatan target penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan BKAD Bantul mengundang perangkat desa dan dukuh di beberapa kecamatan di Kabupaten Bantul untuk menghadiri sosialisasi Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.





Dalam peraturan Bupati tersebut khusus untuk pengajuan pengurangan PBB P2 atas tanah kas dan lungguh lebih dimudahkan persyaratannya. Dan karena pengkhususan ini hanya terbatas waktunya, maka disosialisasikan segera, agar bisa segera dimanfaatkan oleh para perangkat desa yang memiliki kewajiban pajak atas tanah kas dan pelungguh mereka.

Jangka waktu yang diberikan untuk pengajuan pengurangan ini, seperti tercantum dalam surat keputusan Bupati Bantul No. 72 Tahun 2020 adalah dari tanggal 17 Februari - 17 April 2020.

REKAPITULASI POKOK KETETAPAN PBB P2 KAS DESA DAN LUNGGUH YANG BELUM LUNAS TAHUN 2013 S/D 2019

REKAPITULASI POKOK KETETAPAN PBB P2 KAS DESA DAN LUNGGUH YANG BELUM LUNAS TAHUN 2013 S/D 2019

TAHUN	KAS DESA		TANAH LUNGGUH		TOTAL	
	JML NOP	NOMINAL	JML NOP	NOMINAL	JML NOP	NOMINAL
2013	2.481	336.902.438	3.896	641.623.375	6.377	978.525.813
2014	1.878	367.642.853	3.722	781.624.757	5.600	1.149.267.610
2015	497	125.773.486	3.627	1.007.406.989	4.124	1.133.180.475
2016	300	52.038.196	3.635	1.025.102.246	3.935	1.077.140.442
2017	365	68.615.497	3.368	1.293.224.489	3.733	1.361.839.986
2018	67	11.489.958	3.043	1.240.250.363	3.110	1.251.740.321
2019	329	382.70.736	3.202	2.035.780.774	3.531	2.418.451.510
TOTAL	5.917	1.345.133.164	24.493	8.025.012.993	30.410	9.370.146.157

PIUTANG OH PIUTANG



2020/3/10 09:37

Mana ada ya yang senang dengan piutang? Urusan hutang dan piutang itu tidak ada yang mengenakan ya. Apalagi ini piutang pajak se Kabupaten Bantul. Dimana wajib pajak yang berkewajiban membayar piutangnya sudah turun menurun, pengelolanya juga sudah berpindah-pindah tangan. Iya piutang PBB P2 yang akan kita bahas disini adalah piutang PBB P2 warisan dari pengelolaan pemerintah pusat yang mulai tahun 2013 dilimpahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Selain menjadikan realisasi kepatuhan PBB P2 nya tidak akan bisa 100%, adanya piutang ini selalu menjadi pertanyaan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) saat melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan di Kabupaten Bantul. Agar permasalahan piutang ini bisa menjadi jelas dan bisa selesai, BPK mengamanatkan untuk melayangan surat pemberitahuan piutang PBB P2 kepada seluruh wajib pajak yang terdata masih memiliki piutang dari sejak pelimpahan kewenangan PBB P2 ke Pemerintah Kabupaten Bantul.



2020/3/10 09:36



2020/3/10 09:37



Kurang lebih 360.000 lembar dicetak dan disampaikan kepada wajib pajak melalui 75 desa di Kabupaten Bantul, untuk selanjutnya disampaikan kepada warga masyarakat selaku wajib pajak melalui dukuh setempat. Berikut table rincian piutang PBB P2 yang dicetak tahun 2020.

Besar harapan dari pemerintah Kabupaten Bantul agar permasalahan piutang ini semakin jelas, mengecil jumlahnya, atau bahkan menjadi nihil. Mari warga Bantul, bersama-sama kita menyelesaikan permasalahan piutang ini jangan sampai menjadi semakin besar tiap tahunnya.



Rekapitulasi Jumlah Piutang Yang Dicetak

Data per 28 Februari 2020

NO.	KECAMATAN	POKOK KETETAPAN	LEMBAR
1	SRANDAKAN	776.682.495	7.112
2	SANDEN	1.048.918.925	11.589
3	KRETEK	711.568.621	9.800
4	PUNDONG	1.290.875.554	19.888
5	BAMBANGLIPURO	1.631.720.704	24.858
6	PANDAK	2.928.316.195	30.263
7	BANTUL	5.276.600.526	22.819
8	JETIS	2.227.931.310	27.033
9	IMOGIRI	1.818.857.246	23.889
10	DLINGO	294.050.924	7.386
11	PLERET	2.107.658.092	13.797
12	PIYUNGAN	5.205.835.004	20.412
13	BANGUNTAPAN	18.220.375.405	28.803
14	SEWON	11.733.783.715	28.960
15	KASIHAN	10.174.523.182	29.948
16	PAJANGAN	896.044.525	10.503
17	SEDAYU	3.737.075.552	18.187
	TOTAL	70.080.817.975	335.247

NO.	KECAMATAN	POKOK KETETAPAN	LEMBAR
1	SRANDAKAN	776.682.495	7.112
2	SANDEN	1.048.918.925	11.589
3	KRETEK	711.568.621	9.800
4	PUNDONG	1.290.875.554	19.888
5	BAMBANGLIPURO	1.631.720.704	24.858
6	PANDAK	2.928.316.195	30.263
7	BANTUL	5.276.600.526	22.819
8	JETIS	2.227.931.310	27.033
9	IMOGIRI	1.818.857.246	23.889
10	DLINGO	294.050.924	7.386
11	PLERET	2.107.658.092	13.797
12	PIYUNGAN	5.205.835.004	20.412
13	BANGUNTAPAN	18.220.375.405	28.803
14	SEWON	11.733.783.715	28.960
15	KASIHAN	10.174.523.182	29.948
16	PAJANGAN	896.044.525	10.503
17	SEDAYU	3.737.075.552	18.187
	TOTAL	70.080.817.975	335.247

SURVEY LOKASI PEMASANGAN TAPPING BOX



Ditengah merebaknya pandemi virus Corona, tau dikenal juga Covid-19 yang dampaknya ternyata sangat luar biasa, tidak hanya menjadikan institusi di bidang kesehatan repot dan waspada tetapi berdampak cukup besar juga di bidang ekonomi, pariwisata dan bahkan pendidikan. Perekonomian lesu, harga bahan-bahan kebutuhan sehari-hari melonjak tajam, pariwisata ambruk, banyak agenda wisatawan yang dibatalkan, termasuk kegiatan studi tour sekolah-sekolah juga ditunda dan bahkan dibatalkan demi mencegah penularan Covid-19.

Hal ini sangat berpengaruh pada bisnis perhotelan dan juga restoran. Akan tetapi kondisi tersebut tidak menyurutkan langkah pemda Bantul untuk melanjutkan agenda optimalisasi PAD sektor pajak daerah yang beberapa waktu lalu sempat di bahas bersama oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan sejumlah wajib pajak Bantul, khususnya wajib pajak Hotel dan Restoran.

Jadi ketika tim pajak Bantul datang berkunjung ke masing-masing wajib pajak untuk melakukan survey mereka tidak kaget lagi.

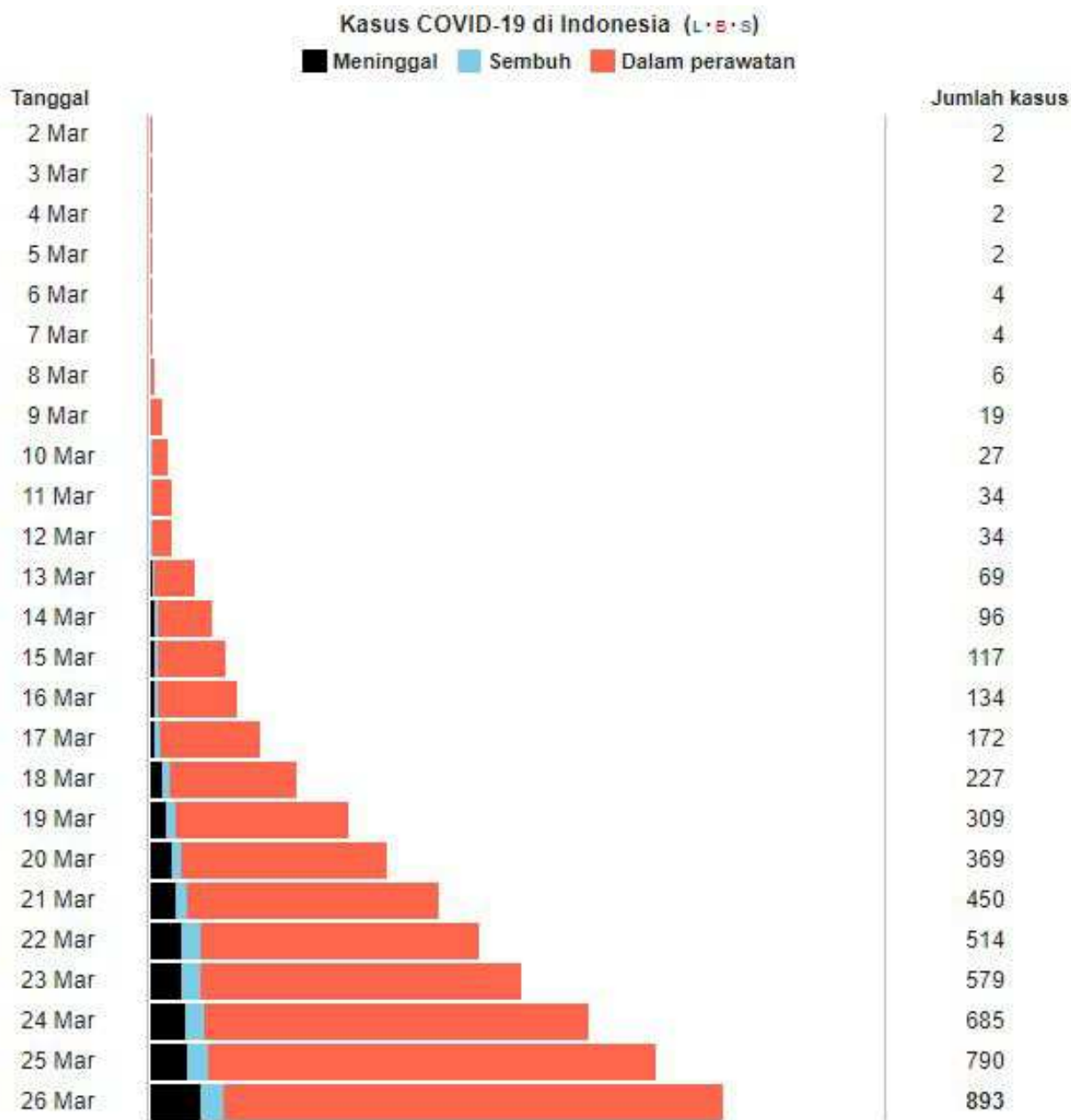


Tim pajak Bantul datang bersama dengan pihak ketiga dari PT Cartens selaku penyedia peralatan sekaligus yang akan melakukan pemasangan tapping box di aplikasi kasir masing-masing wajib pajak. Tujuan survey ini selain untuk mengetahui kekompatibilitas aplikasi kasir dari hotel atau restoran dengan tapping box yang akan dipasang juga dilakukan sosialisasi personal dan penandatanganan berita acara, kesediaan pemasangan tapping box.

Tapping box sendiri ini nanti berfungsi sebagai perekam transaksi yang dilakukan di aplikasi kasir wajib pajak, dalam rangka transparansi pelaporan wajib pajak. Dengan dipasangkannya alat ini diharapkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel dan restoran semakin optimal. Memudahkan wajib pajak dalam pelaporan dan mendukung transparansi pengelolaan pajak daerah.



COVID 19



Wabah penyakit korona virus 2019 atau dikenal sebagai wabah COVID-19 adalah peristiwa wabah penyakit yang disebabkan oleh virus korona 2019 (bahasa Inggris: coronavirus disease 2019, disingkat COVID-19). Penyakit ini disebabkan oleh korona virus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. COVID-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada bulan Desember 2019 setelah beberapa orang

mengalami pneumonia tanpa sebab yang jelas dan prosedur perawatan dan vaksin yang diberikan ternyata tidak efektif menyembuhkan. Kemunculan penyakit diduga berhubungan dengan pasar grosir makanan laut Huanan yang menjual hewan hidup. Virus yang masih satu keluarga dengan SARS dan MERS ini ternyata sangat infeksius artinya sangat mudah menular dari manusia ke manusia lainnya.

Ketika pemerintah Cina menyadari akan bahaya virus korona dan kemungkinan penyebarannya, ternyata sekitar 300 ribu orang warga Wuhan sudah keluar dari kota tersebut. Disinilah awal mula penyebaran virus korona ke luar kota wuhan dan bahkan sampai ke negara-negara lain, termasuk Indonesia.

Pemerintah Cina segera memberlakukan kebijakan lockdown dikota Wuhan , yang akhirnya diikuti negara-negara di dunia yang ikut terdampak mewabahnya virus korona terutama negara-negara dimana grafik penderita positif koronanya meningkat tajam.seperti Italia, Spanyol, Perancis, Belanda, Denmark dan masih banyak lagi.

Kebijakan lockdown adalah suatu kebijakan dimana suatu wilayah atau negara mengisolasi diri tidak boleh ada yang keluar atau masuk ke wilayah yang di lockdown. Warga masyarakat harus berdiam diri di rumah tidak boleh beraktivitas diluar rumah. Kantor-kantor diliburkan, sekolah-sekolah libur, begitu juga pusat perbelanjaan yang memungkinkan manusia saling bertemu dan berinteraksi di tutup sementara. Kebijakan lockdown ini diambil untuk mengurangi penyebaran virus yang dimungkinkan akan semakin meningkat jika manusia masih terus saling berinteraksi dan beraktivitas seperti biasa.



COVID 19 & PAJAK BANTUL



Pasien yang terinfeksi covid 19, pertama kali diumumkan oleh Presiden Jokowi pada tgl 02 Maret 2020. Dan jumlahnya semakin bertambah hingga berita ini ditayangkan sudah menjangkau 790 orang hanya dalam kurun waktu 25 hari. Untuk itu pemerintah Indonesia saat ini sedang menggalakkan program social distancing, sekolah-sekolah di liburkan diganti dengan kegiatan belajar dari rumah, sejumlah kantor pemerintah diberlakukan shift Work From Home (WFH),menghindari keramaian dan kerumunan orang dan dianjurkan untuk lebih banyak berdiam di rumah.

Pemerintah Kabupaten Bantul juga bersiap diri dengan dikeluarkannya instruksi Bupati Bantul No. 1/Instr/2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease 19 (COVID-19). Antara lain dengan meningkatkan kebersihan lingkungan, melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan masing-masing,melakukan perlindungan secara mandiri dengan membudidayakan cuci tangan dengan sabun, cuci muka dan berkumur.



PENGUMUMAN

SESUAI INTRUKSI BUPATI BANTUL NO 1/INSTR/2020 TENTANG PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP RESIKO PENULARAN CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19) MAKA BKAD MEMBERLAKUKAN BEBERAPA PERUBAHAN SISTEM PELAYANAN SOCIAL DISTANCE MULAI BERLAKU PADA HARI KAMIS TANGGAL 26 MARET 2020 SAMPAI DENGAN 30 APRIL 2020 :

1. MENIADAKAN PELAYANAN TATAP MUKA
2. MENGGANTI PELAYANAN TATAP MUKA MENGGUNAKAN APLIKASI WHATSAPP DENGAN NOMOR **0822 4190 0881** HANYA CHAT (PENGAMPU ANANDITA DEWANGGA)
3. JENIS PELAYANAN YANG DIBUKA YAITU :
 - A. PERMOHONAN PBB P2;
 - B. PERMOHONAN BPHTB;
 - C. PERMOHONAN PAJAK DAERAH LAINNYA;
 - D. KONFIRMASI PENGAMBILAN BERKAS;
 - E. KONFIRMASI PETA PBB P2; DAN
 - F. CUSTOMER SERVICE
4. INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT MENGHUBUNGI KANTOR BKAD DENGAN NO TLP (0274) 367260

DEMIKIAN PENGUMUMAN INI DIBUAT AGAR MENJADI PERHATIAN

Bantul, 24 MARET 2020

Kepala Badan,


 Drs. Trishan Maryung, M.Si
 (Pembina : Iy/a)

NIP. 19711230 199603 1 002

Nb: apabila ada perubahan ketentuan akan di sosialisasikan melalui no Whatsapp tersebut

Pelayanan melalui Whatsapp ini melaksanakan social distance dalam upaya menghambat penyebaran Virus Corona

Syarat-syarat pelayanan dan Formulir permohonan akan di upload di Web service

Pajak Daerah dengan alamat pajakda.bantulkab.go.id

Untuk mengetahui riwayat pembayaran PBB P2 dan mengetahui proses permohonan BPHTB dapat diketahui melalui aplikasi **LAPAK BANTUL** (download aplikasinya)

Ada 6 Pelayanan melalui Whatsapp yaitu :

1. Permohonan PBB P2;
2. Permohonan BPHTB;
3. Permohonan Pajak Daerah Lainnya;
4. Konfirmasi Pengambilan Berkas;
5. Konfirmasi Peta PBB; dan
6. Customer service.

Tata cara pengajuan permohonan :

1. Permohonan melalui Whatsapp diterima di hari kerja mulai jam 8.00 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB, apabila melebihi jam pelayanan maka tidak akan ada respon ke pemohon dan dapat dilakukan pengulangan permohonan pada jam pelayanan pada hari kerja berikutnya;
2. Permohonan dapat di kirimkan ke BKAD bidang Pelayanan dan Penetapan dengan NOMOR **0822 4190 0881** (Pengampu Anandita Dewangga)
3. Pengiriman berkas atau permohonan didahului dengan mengirimkan :

Jenis Pelayanan	:	
Nama Pemohon	:	
Alamat Pemohon	:	
No TLP	:	
Nama Wajib Pajak	:	
NOP	:	

Contoh Pengisian :

Jenis Pelayanan	:	Permohonan PBB P2
Nama Pemohon	:	Budi atmojo
Alamat Pemohon	:	Pelemsewu rt 05 Panggungharjo Sewon Bantul
No TLP	:	081 226 058 234
Nama Wajib Pajak	:	Hadi Utomo
NOP	:	34.02.130.005.006.0067.0

4. Mengirimkan file permohonan dan lampiran yang telah di isi lengkap serta syarat-syarat pendukung permohonan atau dapat berupa FOTO

Cara pengambilan berkas jadi:BPS.harap di cetak atau di Fotocopy 2 x

1 dikumpulkan tiap hari Senin setelah ada konfirmasi selesai / jadi dilengkapi

a. SPPT PBB P2 asli apabila permohonan cetak PBB 2020

b. SSPD BPHTB asli apabila permohonan validasi BPHTB

2 Dibawa Tiap Hari Kamis untuk mengambil berkas yang sudah selesai atas BPS yang di kumpulkan hari

Instruksi tersebut segera dijalankan oleh BKAD dan tim pajak Bantul yang terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Dimulai dengan membersihkan lingkungan tempat kerja dan juga sarana prasarana layanan.

1. Bersih-bersih kantor dan dilanjutkan penyemprotan disinfektan oleh petugas;
2. Membersihkan dan menyemprot disinfektan mobil keliling pajak;
3. Penyediaan hand sanitizer bagi ASN dan juga wajib pajak yang datang ke kantor;
4. Himbuan untuk menjaga jarak saat mengantri menunggu giliran layanan pajak;
5. Himbuan untuk menggunakan masker bagi yang sedang sakit
6. Penggunaan kaos tangan sekali pakai bagi petugas pajak yang berhubungan langsung dengan berkas-berkas dan menerima uang dari mobil keliling
7. Mobil keliling pajak digunakan untuk siaran dari desa ke desa di seluruh kecamatan di Kabupaten Bantul menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas diluar rumah demi menghindari penyebaran covid 19.
8. Mengurangi layanan langsung kepada wajib pajak dengan mengoptimalkan layanan berbasis web yang sudah disediakan antar lain menggunakan aplikasi LAPAK, pajakda.bantulkab.go.id dan juga layanan whatsapp 0822 4190 0881

PELAYANAN MELALUI WHATAPP INI MELAKSANAKAN SOCIAL DISTANCE DALAM UPAYA MENGHAMBAT PENYEBARAN VIRUS CORONA

SYARAT-SYARAT PELAYANAN DAN FORMULIR PERMOHONAN AKAN DI UPLOAD DI WEB SERVICE PAJAK DAERAH DENGAN ALAMAT pajakda.bantulkab.go.id

UNTUK MENGETAHUI RIWAYAT PEMBAYARAN PBB P2 DAN MENGETAHUI PROSES PERMOHONAN BPHTB DAPAT DIKETAHUI MELALUI APLIKASI "LAPAK BANTUL" (DOWNLOAD APLIKASINYA)

TATACARA PENGAJUAN PERMOHONAN :

1. PERMOHONAN MELALUI WHATSAPP DITERIMA DI HARI KERJA MULAI JAM 8.00 WIB SAMPAI DENGAN JAM 12.00 WIB, APABILA MELEBIHI JAM PELAYANAN MAKA TIDAK AKAN ADA RESPON KE PERMOHONAN DAN DAPAT DILAKUKAN PENGULANGAN PERMOHONAN PADA JAM PELAYANAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA;
2. PERMOHONAN DAPAT DI KIRIMKAN KE BKAD BIDANG PELAYANAN DAN PENETAPAN DENGAN NOMOR 0822 4190 0881 (PENGAMPU ANANDITA DEWANGGA)
3. PENGIRIMAN BER BERKAS ATAU PERMOHONAN DIDAHULUI DENGAN MENGIRIMKAN :

JENIS PELAYANAN	:	
NAMA PEMOHON	:	
ALAMAT PEMOHON	:	
NO TLP	:	
NAMA WAJIB PAJAK	:	
NOP	:	

4. MENGIRIMKAN FILE PERMOHONAN DAN LAMPIRAN YANG TELAH DI ISI LENGKAP SERTA SYARAT-SYARAT PENDUKUNG PERMOHONAN ATAU DAPAT BERUPA FOTO

CONTOH PENGISIAN :

JENIS PELAYANAN	:	PERMOHONAN PBB P2
NAMA PEMOHON	:	BUDIATMOJO
ALAMAT PEMOHON	:	PELEMSEWU RT 05 PANGGUNGHARJO SEWON BANTUL
NO TLP	:	081 226 058 234
NAMA WAJIB PAJAK	:	HADI UTOMO
NOP	:	34.02.130.005.006.0067.0

BANTUL BISA LAWAN COVID-19



Hampir sebulan, Covid-19 masuk ke wilayah Indonesia dan Jogja pada khususnya. Dan Bahkan Bantul pun sudah mulai ada yang dinyatakan positif korona. Sungguh tak terpikirkan sebelumnya bahwa wabah virus kali ini benar-benar meluas penyebarannya, tidak saja menimbulkan masalah di bidang kesehatan, akan tetapi hampir semua aspek kehidupan masyarakat ikut berubah karenanya. Proses penyebarannya yang relative sangat cepat, sangat infeksius antar manusia, menjadikan kita harus sangat berhati-hati dan waspada dalam beraktivitas sehari-hari. Menjaga kebersihan diri lingkungan, daya tahan tubuh dan juga menjaga interaksi dengan orang lain menjadi isu yang sangat besar saat ini.

Pemerintah pusat juga menganjurkan adanya social distancing guna mengendalikan penyebaran virus korona ini. Menindaklanjuti hal tersebut, Bupati Bantul H. Suharsono juga mengeluarkan Instruksi Bupati No. 1/Instr/2020 Tentang peningkatan kewaspadaan terhadap resiko penularan infeksi corona viruse disease-19 (Covid-19). Yang antara lain adalah social distancing atau menjaga jarak dengan orang lain, menghindari kerumunan massa, menghindari banyak beraktivitas di luar rumah yang bisa meningkatkan resiko penularan. Bagi ASN di Kabupaten Bantul diterapkan system shift.

Sekolah-sekolah juga diliburkan diganti dengan system pembelajaran online. Guru mengirimkan materi untuk dipelajari dan

mengirimkan tugas sebagai evaluasi pembelajaran. Suasana menjadi sepi dan lengang. Hal ini tentu berdampak bagi para pekerja terutama disektor pariwisata, hotel, dan juga rumah makan. Tak ada lagi orang yang melakukan traveling ataupun menginap ataupun mengadakan acara semacam gathering di hotel ataupun tempat-tempat wisata. Banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan akibat dampak dari virus korona ini. Usaha mereka sepi sehingga harus meliburkan sementara para pegawainya sampai batas waktu yang belumbisa ditentukan.

Sungguh merupakan hal yang sulit bagi para pegawai dengan penghasilan harian dengan kondisi ini, hal ini mengetuk hati tim pajak Bantul untumelakukan kegiatan social bagi sembako bagi para pekerja harian yang terdampak virus korona.

Tim pajak Bantul bersama Bupati Bantul, pada hari Selasa 31 Maret 2020 membagikan sekitar 150 paket sembako kepada para tukang becak, dan pengemudi ojek online.

Mereka terlihat sangat gembira dengan aksi social ini, dari informasi yang didapatkan dari pengemudi becak itu memang kondisi sekarang sepi penumpang, dulu sebelum virus korona menyebar bisa membawa pulang uang Rp.50.000 sekarang dengan adanya social distancing ini paling hanya bisa dapat Rp.10.000. sungguh sangat sedih mendengarnya. Semoga wabah ini segera berakhir dan aktivitas bisa normal kembali. Jogja banyak wisatawan lagi, hotel laris lagi, becak dan ojol juga ramai lagi. Mari sama-sama berdoa agar hal itu bisa segera terwujud. Dan mari sisihkan sebagian rejeki kita untuk mereka-mereka yang terdampak secara ekonomi. Bantul bisa lawan korona.





Pemerintah
Kabupaten Bantul



Drs. H. Suharsono
Bupati Bantul

Pemantauan Corona

<https://corona.bantulkab.go.id>
<https://sebaran-covid19.jogjaprov.go.id>

JAGA BANTUL DARI CORONA (COVID-19)

- Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih & Sehat
- Cuci Tangan Dengan Sabun / Hand Sanitizer
- Kurangi Berpergian
- Hindari Kerumunan
- Hindari Pertemuan Kelompok
- Hindari Jabat Tangan



Pemerintah Kabupaten Bantul

LAPOR & PERIKSA GEJALA CORONA (COVID-19)

- Demam 38° C
- Batuk / Pilek
- Sakit Tenggorokan
- Gangguan Pernapasan

Drs. H. Suharsono
Bupati Bantul

Pemantauan Corona

<https://corona.bantulkab.go.id>
<https://sebaran-covid19.jogjaprov.go.id>

HOTLINE COVID-19 BANTUL

112 / 119

1. RSUD Panembahan Senopati
2. RSPAU Dr. Hardjolukito
3. RS Santa Elizabeth
4. RS PKU Muhammadiyah Bantul
5. Seluruh Puskesmas Se Kab. Bantul

MONITORING & EVALUASI LAPORAN BULANAN PPAT



Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 92 ayat 1 harus melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Bertempat di Aula Bank Bantul, Selasa, 11 Februari 2020, diselenggarakan monitoring dan evaluasi laporan bulanan PPAT yang selama ini telah berjalan. Dalam acara tersebut PPAT diharap lebih tertib lagi dalam menyerahkan Laporan Bulanan PPAT ke BKAD, yaitu paling lambat tgl 10 bulan berikutnya.

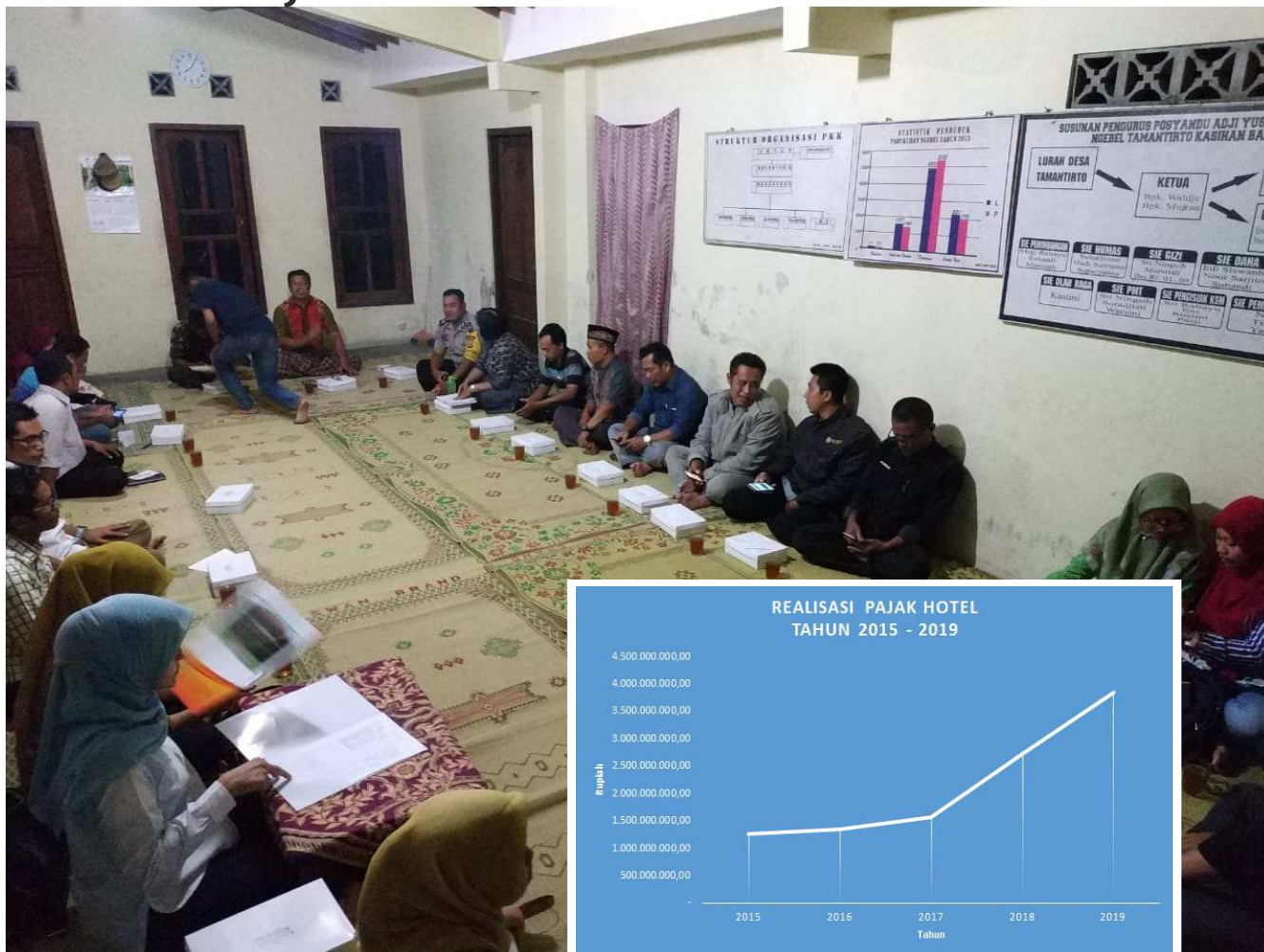


Karena ada sanksi administrative berupa denda sebesar 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan. Dan laporan yang dikirimkan ke BKAD adalah laporan dalam bentuk hard copy seperti yang sudah berjalan selama ini.

seperti yang sudah berjalan selama ini. Dan untuk tahun 2020 disertakan dengan soft filenya. Forum juga berdiskusi tentang poin poin yang perlu diperbaiki dalam proses layanan validasi

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dengan adanya acara ini diharapkan BKAD dan PPAT bisa bersinergi lebih baik untuk meningkatkan kualitas layanan kepada wajib pajak.

SOSIALISASI PENDATAAN HOTEL, WISMA DAN PONDOKAN



Potensi pendapatan dari sektor hotel, wisma dan pondokan atau kost-kostan di Kabupaten Bantul selama ini masih belum dikelola secara maksimal. Terutama untuk potensi dari kost-kostan yang cukup banyak ada di wilayah yang berdekatan dengan kampus-kampus. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bantul berencana untuk mulai menggarapnya dengan lebih serius.

Hal ini diawali dengan dilaksanakannya sosialisasi terhadap warga masyarakat di sekitar kampus tentang akan dilaksanakannya pendataan pondokan atau kost-kostan.

Sosialisasi pertama dilaksanakan malam hari 07 Oktober 2019 bertempat di daerah Ngebel, Tamantirto, Kasihan Bantul.

KEMERIAHAN PESTA RAKYAT DI ACARA PAJAK BANTUL AWARD 2019



Pajak Bantul Award selain sebagai malam penganugerahan penghargaan kepada wajib pajak terpilih di Kabupaten Bantul, juga sebagai ajang pesta bagi masyarakat Bantul. Karena di akhir acara selalu menghadirkan acara musik dan pesta kembang api yang bisa dinikmati oleh masyarakat Bantul dan sekitarnya. Lebih meriah dari tahun sebelumnya, yang diundang tahun ini sebagai bintang tamu adalah Band dari ibukota, Band Kotak.

Sebelum tampil malam harinya, personil kotak beramah tamah dengan Bupati Bantul, Drs. H.Suharsono dan jumpa pers dengan wartawan. Yang dilanjut dengan cek sound dan berfoto bersama penggemar. Walaupun persiapan untuk acara Pajak Bantul Award terbilang cukup mepet karena dilaksanakan berdekatan dengan jatuh tempo pembayaran PBB P2 periode ketiga yaitu bulan September, akan tetapi acara berlangsung lancar dan meriah.





Kemeriahan acara bertambah dengan adanya kejutan kue ulang tahun dan kotak yang menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk ibu Bupati, ibu Erna Suharsono. Sekitar sepuluh lagu dinyanyikan kotak dengan baik, masyarakat terlihat begitu bersemangat mengikuti lirik lagu yang dinyanyikan.

Semakin malam penonton semakin bersemangat, apalagi Kotak juga membagikan doorprize yang dilempar ke tengah-tengah penonton, sehingga menambah kemeriahan acara. Acara ditutup dengan pesta kembang api.



SANG BINTANG PAJAK 2019



Malam anugerah Pajak Bantul Award, tahun ini bertajuk “Sang Bintang” digelar di halaman Pendopo Parasamya Kabupaten Bantul tanggal 8 Oktober 2019. Berkonsep pesta kebun, sekitar dua ratusan tamu duduk dibawah taburan bintang di langit untuk menyaksikan siapa yang menjadi “Bintang Pajak 2019”. Diundang pada kesempatan tersebut sebagai nominator sang bintang perorangan selaku wajib pajak terpilih, dukuh, kepala desa, dan camat dengan capaian pendapatan pajak bumi dan bangunan diatas 90% dan berkinerja baik serta berpartisipasi aktif dalam menggerakkan warganya untuk tertib membayar PBB P2. Hadir sebagai tamu undangan adalah jajaran pejabat di Pemda Kabupaten Bantul, Forkopimda, OPD-OPD terkait, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul, KPP Pratama Bantul dan bank-bank rekanan pembayaran pajak daerah.

Dari sebelas macam pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, yang diberikan penghargaan hanya delapan macam pajak daerah, dan satu kategori yang tidak merujuk pada jenis pajaknya yaitu penghargaan sebagai wajib pajak yang taat pajak.

Dalam laporan penyelenggaraanya kepala BKAD, Drs. Trisna Manurung, M.Si menyampaikan bahwa dari sebelas macam pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Bantul, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sampai dengan triwulan 3 (minggu pertama bulan September) sudah melampaui target dalam satu tahun. Sebuah capaian yang bagus yang tidak lepas dari pelayanan jemput bola dengan mobil keliling pajak yang rutin beroperasi baik hari kerja maupun hari libur dan bahkan di malam hari.



Dari sebelas macam pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, yang diberikan penghargaan hanya delapan macam pajak daerah, dan satu kategori yang tidak merujuk pada jenis pajaknya yaitu penghargaan sebagai wajib pajak yang taat pajak.

Dalam laporan penyelenggaraanya kepala BKAD, Drs. Trisna Manurung, M.Si menyampaikan bahwa dari sebelas macam pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Bantul, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sampai dengan triwulan 3 (minggu pertama bulan September) sudah melampaui target dalam satu tahun. Sebuah capaian yang bagus yang tidak lepas dari pelayanan jemput bola dengan mobil keliling pajak yang rutin beroperasi baik hari kerja maupun hari libur dan bahkan di malam hari.

BERANI JUJUR HEBAT

Pernah dengar slogan "Berani Jujur, Hebat" ? Pasti pernah kaan?. Yaa itu adalah slogan dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Tema atau slogan ini diusung karena tiga hal. Jujur adalah langkah awal (untuk) memberantas korupsi, Jujur adalah nilai yang paling fundamental, dan jujur saat ini langka sehingga harus digalakkan agar masyarakat luas menjadi terbiasa untuk bersikap jujur dalam hal apapun.

Nah belum lama ini KPK berkunjung ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, bukan dalam rangka pemeriksaan yaa kawab pajak Bantul, akan tetapi dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah. Loh apa hubungannya KPK dan optimalisasi penerimaan daerah ya?





ly jadi latarbelakang keterkaitannya adalah mengantisipasi potensi kehilangan penerimaan daerah. Hal yang bisa menimbulkan potensi kehilangan penerimaan daerah adalah system penerimaan pajak yang masih manual, perhitungan yang belum akurat, dan kurangnya pengawasan. Hal ini berlaku untuk jenis pajak self assessment.

Langkah yang akan dilakukan adalah dengan memasang alat perekam transaksi di mesin kasir atau yang disebut tapping box. Selain bisa memantau dan merekam transaksi yang terjadi agar penghitungan pajak lebih transparan, hasil perekaman data transaksinya bisa dimanfaatkan untuk penyusunan laporan dan analisis usaha yang bermanfaat dalam proses manajemen usaha wajib pajak.



TEMU WAJIB PAJAK DI GRAND DAFAM ROHAN



Di penghujung tahun 2019 yang lalu, pemerintah Kabupaten Bantul, mengundang wajib pajak yang ada di Kabupaten Bantul. Bertajuk sosialisasi pajak daerah sosialisasi dilaksanakan di Grand Dafam Rohan, Senin, 9 Desember 2019. Dan lebih tepat disebut sebagai media silaturahmi dan bertukar pemikiran mengenai pajak daerah di Kabupaten Bantul, ketimbang sosialisasi. Karena memang pemerintah Kabupaten Bantul ingin mendapat masukan tentang berbagai layanan pajak yang selama ini diberikan kepada wajib pajak. Acara yang dibuka dan di pimpin oleh PLT Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan, Dharmawan Purwana, S.E berlangsung lancar.

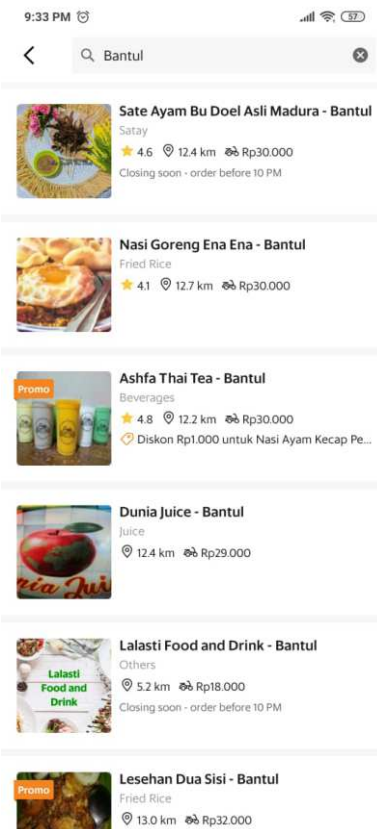
Peserta antusias menanggapi paparan, mengajukan berbagai pertanyaan, kritikan dan masukan demi pengelolaan pajak yang lebih baik dan nyaman baik bagi wajib pajak maupun pemerintah daerah. Apa yang dirasakan sebagai kendala disampaikan oleh wajib pajak dan ditanggapi langsung oleh pemerintah Kabupaten Bantul



GHOST RESTO



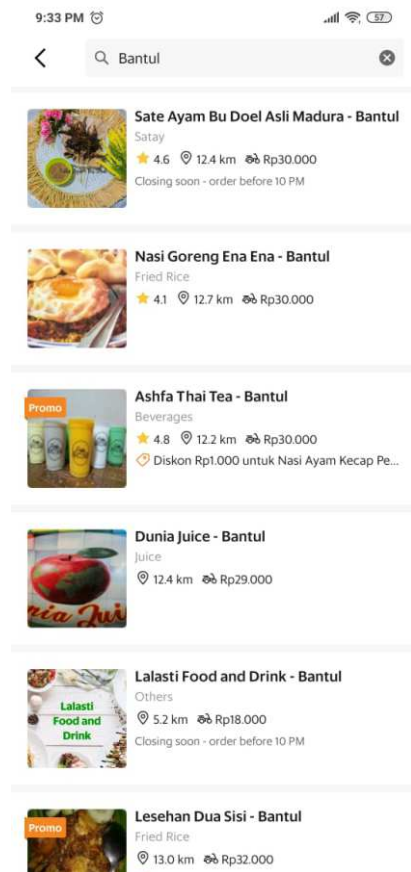
Satu lagi dampak dari perkembangan bisnis di era industry 4.0 yaitu terjadinya disruption diberbagai bidang. Salah satunya dibidang kuliner. Perkembangan teknologi saat ini memang memungkinkan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan cepat dan mudah, dengan hanya bermodalkan smartphone. Fenomena yang berkembang saat ini adalah masyarakat semakin banyak memanfaatkan jasa pesanan layan antar. Hal ini membuka peluang bagi masyarakat untuk membuka usaha kuliner rumahan, tanpa ada warung atau tempat makannya. Bagi pelaku usaha kuliner virtual memang praktis dan menguntungkan tanpa harus pakai ijin, membangun warung atau restorannya, memperkerjakan karyawan dan karena tidak terlihat secara fisik jadi belum terdaftar juga sebagai wajib pajak daerah.



Semakin merebaknya kuliner virtual ternyata dirasakan oleh para pelaku usaha kuliner konvensional, dimana mereka merasakan jumlah pengunjungnya berkurang. Persaingan usaha sebenarnya hal yang biasa dan justru bisa sebagai pemacu untuk lebih kreatif dan inovatif dalam rasa dan penyajian agar menarik. Yang disayangkan karena ada sebagian pelaku usaha kuliner konvensional yang setelah ramai justru menutup warungnya dan beralih ke resto virtual, biaya operasional mereka tentu lebih kecil, dan belum tersentuh pajak.

Hal ini yang dikeluhkan oleh para pelaku usaha kuliner di wilayah Kabupaten Bantul, sebagaimana mereka sampaikan dalam acara sosialisasi pajak daerah di hotel Grand Dafam Rohan, 9/12 2019.

Dari BKAD sendiri sebetulnya sudah mulai aware dengan kehadiran ghost resto atau resto virtual ini, dan mulai ada pendataan, tetapi bagaimana pengenaan pajaknya masih menunggu aturan dari pusat.



SERBA SERBI SOSIALISASI MALAM HARI



Padatnnya rutinitas warga dan juga kegiatan tim pajak menjadikan agenda sosialisasi piutang pajak diagendakan di malam hari. Diharapkan dengan pilihan waktu malam hari banyak warga masyarakat selaku wajib pajak yang bisa hadir. Sehingga penyampaian materi bisa di terima dengan baik dan apa yang menjadi harapan pemda Bantul lambat laun bisa tercapai.

Berdasarkan amanat undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pemerintah pusat melimpahkan wewenang pengelolaan PBB P2 kepada pemerintah daerah. Mulai tahun 2013, pengelolaan PBB P2 dari pemerintah pusat, dalam hal ini KPP Pratama Bantul di limpahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.





Dalam proses pelimpahan ini dilimpahkan juga data piutang PBB P2 yang semakin tahun semakin bertambah jumlahnya. diharapkan dengan dilaksanakannya sosialisasi piutang PBB P2 sebagai tindak lanjut penyampaian STPD PBB P2 (Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Banguna Perdesaan dan Perkotaan) bisa membuahkan hasil dengan lambat laun menghapus piutang pajak yang sudah turun temurun.

Kegiatan sosialisasi malam hari tahun 2019 yang lalu dilaksanakan di tiga tempat yang berbeda, yaitu di wilayah kecamatan Sedayu, Bangunjiwo, dan Piyungan.



SOSIALISASI KETENTUAN DIBIDANG CUKAI TEMBAKAU TAHUN 2019

Berempat di Aula Bank Bantul Jl. Gajah Mada No. 3, 17 Desember 2019, diselenggarakan sosialisasi ketentuan di bidang cukai tembakau dengan mengundang 250 orang tokoh masyarakat di Kabupaten Bantul. Acara dibuka oleh sekretaris BKAD Bantul, Suyono S.E dilanjutkan dengan materi yang disampaikan oleh narasumber dari BPKA Provinsi DIY.

Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai adanya peredaran pita rokok tanpa cukai yang harus dilaporkan. Karena peredaran rokok tanpa cukai atau dengan cukai palsu merugikan negara.





Diharapkan dengan masyarakat yang semakin teredukasi tentang cukai ilegal, perolehan bagi hasil cukai tembakau dari pemerintah pusat semakin optimal. Adapun perolehan bagi hasil cukai tembakau digunakan untuk :

- a. Peningkatan kualitas bahan baku
- b. Pembinaan industri
- c. Pembinaan lingkungan sosial


WORKSHOP BENDAHARA PENGELUARAN KABUPATEN BANTUL



Apa kaitan bendahara pengeluaran dengan pajak? Bendahara pengeluaran bertugas melakukan pemotongan, menyetor dan sekaligus melaporkan potongan pajak penghasilan yang diterima oleh ASN (Aparat Sipil Negara). Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan.

Walaupun pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran adalah pajak penghasilan, yang sebenarnya bukan kewenangan pemerintah Daerah. Tetapi pemerintah Daerah dalam hal ini BKAD bertanggung jawab agar pelaksanaannya berlangsung tertib sesuai aturan yang berlaku sehingga bagi hasil pajak yang diterima sesuai dengan yang telah ditargetkan.





Selain daripada itu dengan diadakan kegiatan workshop seperti ini sekaligus sebagai media sharing antar bendahara pengeluaran sehingga bisa diperoleh berbagai hal yang penting terkait ketugasan bendahara selaku pemotong pajak penghasilan, karena ada aturan dalam proses pelaksanaannya, dan juga ada sanksi atas kekeliruannya baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sehingga dalam pelaksanaannya tertib, disiplin dan akuntabel.

Dalam workshop kemarin sekitar 200 orang bendahara hadir antara lain adalah bendahara Desa, bendahara OPD, bendahara Kecamatan, BUMD dan bendahara pembantu dari 18 Dinas di Kabupaten Bantul. Acara dibuka oleh PLT Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Darmawan Purwana, S.E dilanjutkan dengan materi yang disampaikan oleh Ir. Aniek Juliarini, M.Si.

WORKSHOP PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PETUGAS PAJAK DAERAH



Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul secara rutin terus menggelar kegiatan Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) petugas pajak. Seperti akhir tahun 2019 lalu,

sekitar 80 pegawai pajak BKAD -mulai jajaran staf aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN hingga tatanan pejabat struktural- mengikuti agenda workshop peningkatan kapasitas aparatur petugas pajak daerah di Grand Dafam Rohan.

Plt. Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Darmawan Purwana, S.E menyampaikan, melalui workshop seperti ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pegawai pajak. Supaya tetap memiliki motivasi dan semangat kerja tinggi



Melalui kegiatan ini, nantinya para pegawai tidak sekedar mendapat suntikan motivasi namun juga memiliki pengalaman dan energi baru. Sehingga saat kembali menjalankan rutinitas pekerjaan, mereka memiliki semangat yang tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik. Apalagi kedepan tantangan semakin berat.





FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

Bersinergi dalam Meningkatkan Pelayanan Bidang Pertanahan yang Efektif dan Efisien di Kabupaten Bantul

Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) adalah salah satu sumber pendapatan yang cukup besar bagi Pemerintah Kabupaten Bantul. Suksesnya pelayanan BPHTB tidak lepas dari adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Kabupaten Bantul, Badan Pertanahan Nasional Bantul, KPP Pratama Bantul dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah Kabupaten Bantul.





Agar terjalin kerjasama yang baik dalam pelayanan BPHTB, pada tanggal 15 Oktober 2019, bertempat di Ballroom Hotel Grand Dafam Rohan diadakan FGD demi meningkatkan pelayanan yang efektif dan efisien.

Narasumber yang hadir pada kesempatan tersebut adalah:

1. Ir. Agung Subchan Kurnianto, M.M
 2. Iskandar Subagyo, S.H, M.Hum
 3. Honggo Sigit Nurcahyo
 4. Enarwanto, S.H
- Moderator AJ. Sigit Prasetyo, S.H, M.Kn



TANYA JAWAB PAJAK

[KONTAK BKAD] CARA PECAH PBB

Pengirim : Bagus aji y
Alamat : Perum taman sedayu 3 blok i/5
Judul : Cara pecah pbb

Isi Pesan:
Bagaimana cara pecah pbb?
Persyaratan,Tahapan2,Ketentuan2

JAWABAN

Kepada Yth Bagus Aji Y di Perum Taman Sedayu 3 Blok I/5
Syarat pemuthakiran data / Pecah PBB adalah dengan mengajukan permohonan Pemutakiran data PBB dan mengisi SPOP dan LSPOP PBB Perdesaan dan Perkotaan dengan dilampiri :

1. SPPT PBB asli.
2. Fc Sertifikat Hak Milik I Hak Guna Bangunan
3. FC KTP Pemohon dan atau kuasa jika permohonan dikuasakan
4. Print out Pembayaran PBB, bias diunduh pada aplikasi lapak Bantul
5. atau adi BKAD Bantul.
6. FC IMB jika ada.

Untuk keteranga lebih lanjut saudara dapat menghubungi Bidang Pelayanan dan Penetapan setiap hari kerja di nomor 0274 367260.

[KONTAK BKAD] DUPLIKAT SPPT PBB

Pengirim : Arum Candra
Alamat : Jalan gedongkiwo no.13
Judul : Duplikat sppt pbb

Isi Pesan:
Bisakah saya minta salinan atau duplikat pbb yang terbaru karena hilang? Syaratnya apa saja?

JAWABAN

Kepada Yth. Arum Candra di Jl. Gedong Kuning

Syarat mendapatkan salinan SPPT PBB P2 adalah dengan mengajukan permohonan Salinan SPPT PBB P2 dengan melampirkan :

- a. Fotocopy identitas wajib pajak dan kuasa wajib pajak dalam hal dikuasakan;
- b. Surat kuasa dari wajib pajak dalam hal dikuasakan;
- c. Fotocopy SPPT/SKPD PBB P2 tahun sebelumnya;
- d. Bukti lunas PBB 5 (lima) tahun terakhir.



TANYA JAWAB PAJAK

[KONTAK BKAD] SURAT PELUNASAN PBB

Pengirim : Suyeti
Alamat : Jl Wonocatur no 31
Judul : Surat Pelunasan PBB

Isi Pesan:

pak saya mau tanya kalau saya mau minta print pelunasan PBB bisa gak ya pak? terus kalo misal bisa persyaratannya apa saja? terimakasih

JAWABAN

Kepada Yth. Ibu Suyeti di tempat
Bukti pelunasan PBB bisa dilihat melalui aplikasi LAPak Bantul ataupun datang ke kantor layanan BKAD Kabupaten Bantul dan mencetak sendiri bukti pelunasan PBB P2 nya.
Terimakasih.

[KONTAK BKAD] SURAT PELUNASAN PBB

Pengirim : Wahid Nuer

Isi Pesan:

Selamat siang Bapak/ ibu di Kantor BKAD saya warga Bantul, mau menanyakan bagaimana caranya membetulkan ukuran tanah yang berbeda antara di SPPT PBB dan Sertifikat ? Dikarenakan ukuran di SPPT 1000m² sedangkan kenyataan (dalam sertifikat) hanya 450 m².
Mohon penjelasannya, alur serta syarat syarat yang diperlukan untuk membetulkan kesalahan tersebut. Atas informasi dan perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Selamat Siang

JAWABAN

Syarat Pengajuan Mutasi (Proses 14 hari kerja)

Foto copy KTP pemilik (Kalau pemilik sudah meninggal foto copy akta kematian, foto copy KTP dan KK salah satu ahli waris), Foto copy sertifikat/ Letter C, SPPT PBB P2 tahun berjalan, Pelunasan PBB 5 tahun sebelumnya, Surat kuasa apabila dikuasakan Foto copy IMB, Pengisian blangko penyampaian, SPOP dan LSOP

Syarat Pengajuan Pembetulan (Proses 7 hari kerja)

Foto copy KTP pemilik (Kalau pemilik sudah meninggal foto copy akta kematian, foto copy KTP dan KK salah satu ahli waris), Foto copy sertifikat/ Letter C, SPPT PBB P2 tahun berjalan, Pelunasan PBB 5 tahun sebelumnya, Surat kuasa apabila dikuasakan, Foto copy IMB, Pengisian blangko penyampaian, SPOP dan LSOP

Akan tetapi mohon dapat datang atau klarifikasi ke kantor kami guna mencocokkan lokasi sertifikat dengan peta PBB yang ada dikami.

karena perbedaan luas yang besar tersebut dimungkinkan bukan mutasi penuh tetapi mutasi pecah.

[KONTAK BKAD] MENANYAKAN TUNGGAKAN PAJAK

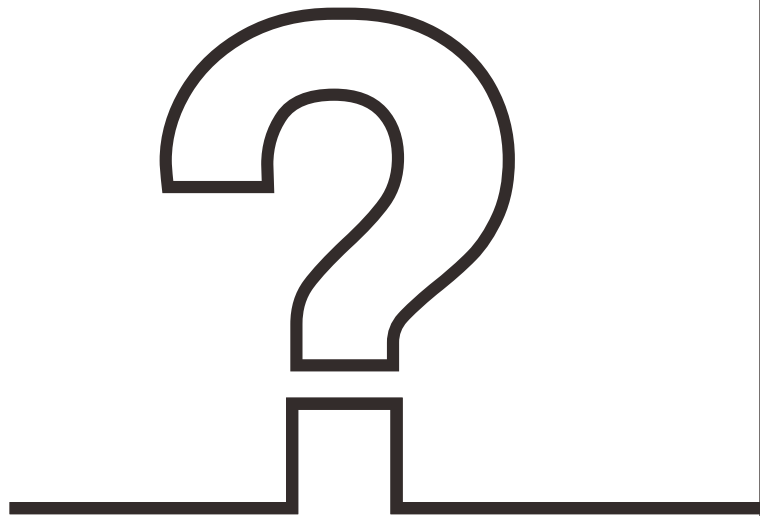
Pengirim : Asti
Alamat : Gamol, Balecatur, Gamping
Judul : Menanyakan tunggakan pajak

Isi Pesan:

Mohon untuk memberikan data info tunggakan pajak 5th sampai th 2019 untuk
1. Nop 34.02.150.003.009-0344 . 0
2. Nop 34.02.150.003.011-0198.0

JAWABAN

Kami Informasikan untuk mengetahui besaran pajak, tunggakan pajak, informasi SPPT dan pelayanan mobil keliling wajib pajak dapat mengetahui secara mandiri dengan cara mendownload aplikasi "Lapak bantul" di aplikasi playstore dan appstore.
Terimakasih.





TAMAN KLODRAN & TAMAN ADIPURA

Wajah kota Bantul semakin terlihat gemeyar, tidak ndeso dan “singup” lagi. Bupati Bantul, Drs. Suharsono telah menata wajah baru Kabupaten Bantul. Setelah sebelumnya pelebaran jalan utama yaitu sepanjang jalan Sudirman, titik nol di depan pasar Bantul, taman paseban dan yang baru saja di resmikan 31 Desember 2019 kemarin adalah taman klodran dan taman Adipura.

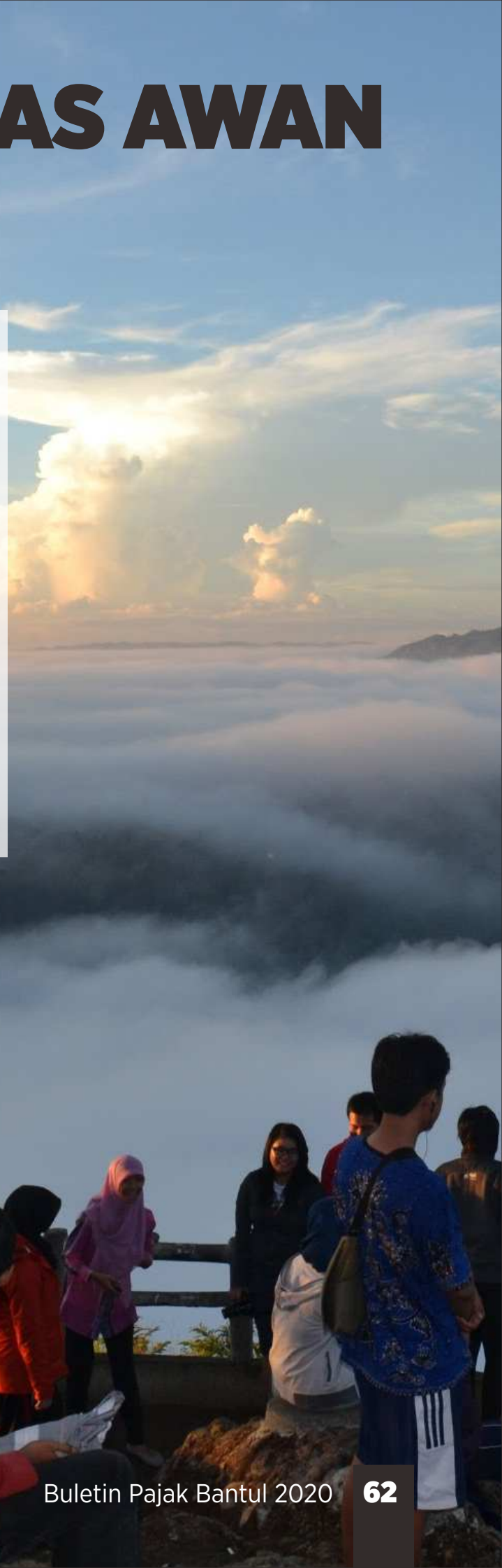
Patung Adipura yang tadinya berada di depan masjid Agung, dipindahkan ke depan polres Bantul dilengkapi dengan air mancur dan wifi sehingga bisa dimanfaatkan menjadi ruang terbuka publik. Sedangkan bekas patung adipura dibuat taman klodran dengan patung Jenderal Sudirman sehingga semakin menambah cantik penampilan kota Bantul.

Wajah baru kota Bantul ini berkat kerjasama Pemerintah Bantul dengan PT Bank BPD DIY.

NEGERI DIATAS AWAN KEBUN BUAH MANGUNAN

Menikmati pemandangan dengan udara yang sejuk bisa menjadi sarana relaksasi di tengah penatnya suasana perkotaan. Seperti salah satu tempat wisata yang satu ini yang terletak di daerah Bantul Yogyakarta, disini terdapat tempat wisata alam yang tersembunyi dengan udara yang sejuk dan indah di pandang mata. Adapun julukan untuk tempat wisata ini banyak orang menyebutnya dengan sebutan negeri diatas awan.

Negeri diatas awan, begitulah julukan bagi Kebun Buah Mangunan di Bantul Yogyakarta, adapun daya Tarik utama tempat wisata ini adalah gardu pandang mangunan. Gardu pandang ini memiliki ketinggian sekitar 200 meter diatas permukaan laut, sehingga pengunjung bisa menikmati keindahan gumpalan awan membalut pegunungan sewu.





Kebun buah magunan berlokasi di Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta. Tempat ini tak pernah sepi pengunjung apalagi pada musim liburan. Adapun yang menjadi tujuan utamanya untuk menikmati wisata ini adalah pada saat menyaksikan terbit dan tenggelamnya matahari. Kita akan menikmati indahnya alam semesta sambil sejenak melepas penat kehidupan perkotaan.



Kebun buah Mangunan di bangun oleh pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2003 silam, berada dilokasi seluas 23 hektar ditanami berbagai jenis pohon buah diantaranya buah belimbing, rambutan, jambu dan durian. Akan tetapi daya Tarik utamanya justru pada keindahan dimana kita bisa seolah-olah berada diatas awan. Pesona negeri di atas awan ini bisa dilihat saat pagi dan juga sore hari. Untuk bisa menikmati pemandangan yang indah ini, kita harus berjalan dari lokasi parker kendaraan sekitar 300 m dengan menuruni anak tangga yang lumayan membuat berkeringat. Akan tetapi akan terbayar dengan indahnya pemandangan sungai Oyo nun jauh dibawah sana dan pemandangan perbukitan yang menghijau khususnya saat musim penghujan. Yuuk buktikan keberadaan negeri diatas awan ini. Cukup dengan membayar tiket masuk sebesar Rp.5000 rupiah per orang. Pulangnya bisa membeli buah yang sedang panen ataupun lanjut jalan-jalan disekitar kebun buah mangunan seperti Goa Gajah Mangunan, hutan pinus mangunan dan masih banyak lagi.

(diambil dari eksotisjogja.com dan sumber lain)

SATE KLATHAK



Ada yang tahu apa itu sate klathak? Bagi warga jogja khususnya wilayah Bantul tentu nggak asing lagi ya dengan nama kuliner sate klathak. Sate klathak adalah hidangan dari daging kambing yang ditusuk dengan jeruji besi, Dibakar dan hanya dibumbui garam. Makanya dulu dinamai sate uyah. Tapi belakangan lebih dikenal dengan nama sate klathak. Dengan dibakar dengan besi menghasilkan daging yang matang sempurna hingga ke dalam daging karena sifat besi yang menghantarkan panas. Setelah sate matang akan disajikan dengan nasi dan kuah gulai yang gurih.



Buat yang belum pernah mencoba dan ingin merasakan nikmatnya kuliner daging kambing ini, kamu bisa berkunjung ke Jalan Imogiri, Bantul. Di sepanjang jalan Imogiri ada sederet warung sate klathak yang populer.

Satu diantaranya sate klathak Pak Pong yang berada

di Jalan Sultan Agung No. 18 Jejeran, Wonokromo, Pleret Bantul. Tempatnya cukup luas dan bisa untuk rombongan akan tetapi harus rela antri cukup lama, terutama pada akhir pekan atau liburan karena pelanggannya membludak. Bahkan pejabat dan artis ada juga yang makan disana.

Selain Sate Klathak Pak Pong, ada pula Sate Klathak Pak Bari. Ini pun tak kalah populernya bahkan menjadi tempat syuting film Ada Apa Dengan Cinta 2 (AADC 2). Nah mau coba yang mana, silakan aja semuanya sama-sama enak.



AGENDA ACARA TAHUN 2020

- 1** **Februari** Workshop Peningkatan Kapasitas SDM
- 2** **Maret** Intensifikasi PPh Ps 21
- 3** **Maret** Sosialisasi Pajak Daerah
- 4** **April** Workshop Potensi Retribusi
- 5** **Juni** Intensifikasi PBB P2
- 6** **Juni** Sosialisasi Pajak Daerah
- 7** **Juni** Sosialisasi Piutang Pajak Daerah
- 8** **Juni** Sosialisasi Potensi Pajak Daerah
- 9** **Juni** Workshop Peningkatan Pelayanan BPHTB
- 10** **Juli** Bantul Ekspo
- 11** **Juli** Sosialisasi Cukai
- 12** **Agustus** Pajak Bantul Award
- 13** **Oktober** Workshop Peningkatan Pelayanan BPHTB
- 14** **November** Festival Pajak Daerah
- 15** **November** Workshop Peningkatan Kualitas Pelayanan










Badan Keuangan dan Aset Daerah



EDISI 4
2020

Buletin Pajak Bantul

INFO & LAYANAN :  bkad@bantulkab.go.id  pajak bantul  pajakbantul
 (0274) 367260 (direct) ; 367509 ext 156
 081779498080  pajakbantul  pajakbantul